

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Tesis)

Oleh

**YOGGA YERRIANDHA
NPM 2421031038**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

YOGGA YERRIANDHA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

YOGGA YERRIANDHA

Studi ini meneliti bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 508 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK-RI dalam jangka waktu 2 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat tidak dapat memperkuat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL ORIGINAL REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA WITH PUBLIC PARTICIPATION AS A MODERATING VARIABLE

By

YOGGA YERRIANDHA

This study examines how local revenue and capital expenditure influence the financial performance of local governments in Indonesia with community participation as a moderating variable. The population in this study was 508 district and city governments in Indonesia that issued regional government financial reports that had been audited by the BPK-RI within a period of 2 years. The sampling technique used in this study uses the census method. The research results revealed that local revenue and capital expenditure did not affect the financial performance of local governments. Community participation can strengthen the influence of local revenue on the financial performance of local governments, and community participation cannot strengthen the influence of capital expenditure on the financial performance of local governments.

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, Financial Performance, Community Participation

Judul Tesis : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja
Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah di Indonesia Dengan Partisipasi
Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi

Nama Mahasiswa : Yogga Yerriandha

Nomor Pokok Mahasiswa : 2421031038

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19750620 200012 2 001


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19740312 200112 1003

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi


Dr. Liza Alvia., S.E., M.Sc., Akt., CA.
NIP. 19790721 200312 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.**

Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

Anggota Penguji : **Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si
NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 April 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yogga Yerriandha

NPM : 2421031038

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 24 April 2026



Yogga Yerriandha

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yogga Yerriandha, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 22 September 1985. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di SD Bhakti Ibu Bakauheni Lampung Selatan lulus tahun 1997, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2000, kemudian melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2003. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan lulus pada tahun 2008. Penulis juga telah mengambil pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Lampung lulus tahun 2013. Kemudian pada tahun 2024 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada program studi Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung

Penulis juga mengembangkan kompetensi melalui pendidikan nonformal dan mempunyai sertifikat dari Ikatan Akuntan Indonesia berupa Chartered Accountant (CA), Certified Government Accounting Associate (CGAA) dan Certified Government Accounting Expert (CGAE) serta mempunyai Register Negara Akuntan (RNA) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

MOTTO

“Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu”
(Q.S. Maryam : 25)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua serta adik-adik saya, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya.

Istri dan ketiga anak saya, yang selalu mendoakan, mendukung dan minta oleh-oleh sehabis pulang kuliah.

Almamater saya Universitas Islam Indonesia dan Universitas Lampung.

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi”. Penyusunan tesis ini guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, petunjuk, data, dan saran maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, nasihat, saran, bimbingan dan perhatiannya yang sangat berharga selama perkuliahan di Magister Ilmu Akuntansi dan juga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama yang telah memberikan ilmu dan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini.
7. Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Penguji Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang luar biasa diberikan agar kami dapat menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat.
9. Kedua orang tua, adik-adik, istri serta ketiga anak-anak penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan selama penulis menjalani studi hingga akhir penulisan tesis ini.
10. Pimpinan dan teman teman kantor di Kabupaten Way Kanan yang sudah memberikan dukungan dan motivasinya.

11. Seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, staf Magister Ilmu Akuntansi, dan staf Magister Manajemen yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2024 bersyukur bisa mengenal teman-teman yang luar biasa dan menjalin silaturahmi yang baik.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Bandarlampung, 24 April 2026

Yogga Yerriandha

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Agensi	9
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	10
2.1.3 Kinerja Keuangan.....	11
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.5 Belanja Modal	14
2.1.6 Partisipasi Masyarakat.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Pengembangan Hipotesis	24
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.3.3 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.3.4 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	29
2.4 Kerangka Penelitian	30
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	32
3.2 Populasi dan Sampel	32
3.3 Definisi Operasional Variabel	33
3.3.1 Variabel Dependen	33
3.3.2 Variabel Independen.....	35
3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah	35
3.3.2.2 Belanja Modal	35
3.3.3 Variabel Moderasi	36
3.4 Metode Penelitian.....	36

3.4.1	Statistik Deskriptif.....	36
3.4.2	Regresi Data Panel	37
3.4.3	Uji Asumsi Klasik	39
3.4.3.1	Uji Normalitas	39
3.4.3.2	Uji Multikolinearitas	39
3.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	39
3.4.3.4	Uji Autokorelasi	40
3.4.4	Model Penelitian	40
3.4.5	Pengujian Hipotesis.....	41
3.4.5.1	Uji Koefisien Determinan (R^2)	41
3.4.5.2	Uji Statistik F	42
3.4.5.3	Uji Statistik t	42
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Pemilihan Populasi dan Sampel	43
4.2	Statistik Deskriptif.....	44
4.3	Regresi Data Panel	46
4.3.1	Uji Chow	46
4.3.2	Uji Hausman.....	46
4.3.3	Uji Langrange-Multiplier	47
4.4	Uji Asumsi Klasik	48
4.4.1	Uji Normalitas	48
4.4.2	Uji Multikolinearitas	50
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	50
4.5	Pengujian Hipotesis.....	51
4.5.1	Uji Koefisien Determinan (R^2).....	51
4.5.2	Uji Statistik F	51
4.5.3	Uji Statistik t.....	52
4.6	Pembahasan	54
4.6.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	54
4.6.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	56
4.6.3	Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	57
4.6.4	Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	59
V.	PENUTUP	61
5.1	Simpulan.....	61
5.2	Keterbatasan	63
5.3	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nilai Kinerja Efisiensi	34
Tabel 4.1	Hasil Sampel Penelitian	43
Tabel 4.2	Hasil Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.3	Hasi Uji Chow	46
Tabel 4.4	Hasi Uji Hausman.....	47
Tabel 4.5	Hasi Uji Uji Langrange-Multiplier	47
Tabel 4.6	Hasi Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.7	Hasi Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik F	52
Tabel 4.9	Hasil Uji Statistik T MRA	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	3
Grafik 1.2	Realisasi Belanja Modal dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	4
Grafik 2.1	Realisasi Realisasi Pajak Daerah Kabupaten / Kota Se-Indonesia Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Tahun 2022 s.d. 2023	18
Grafik 4.1	Hasil Pengujian Uji Normalitas	48
Grafik 4.2	Hasil Pengujian Uji Normalitas Setelah Transformasi Data	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

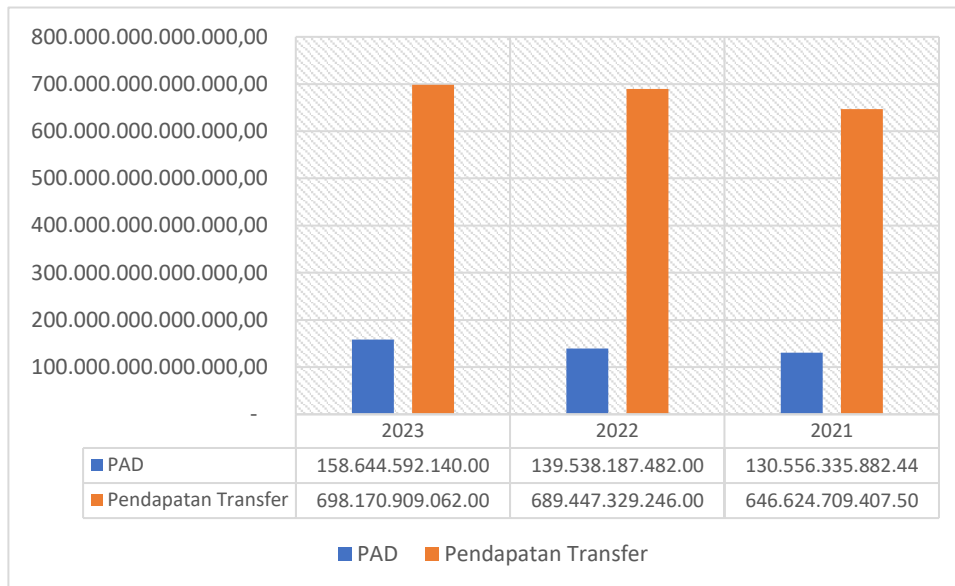
Pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola aparaturnya sendiri dan menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan daerah melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dijadikan ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional yang diberikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah serta pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim & Kusufi, 2017). Pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah dapat dimonitor melalui kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2015). Artinya jika kinerja keuangan pemerintah daerah dijalankan dengan baik, maka pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah akan

terindikasi baik pula. Dan sebaliknya, jika kinerja keuangannya kurang baik dapat diindikasikan pengelola keuangannya dikelola dengan tidak benar.

Menurut Yunita & Rasmini (2020), pengukuran kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah berfungsi untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Daerah dengan kinerja keuangan dinyatakan baik berarti memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi fiskal berperan sangat penting sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan keuangan (termasuk perpajakan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan membelanjakan anggarannya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Tetapi kenyataannya, upaya pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal belum menunjukkan perkembangan yang signifikan karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Setiap tahun ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini semakin terlihat nyata apabila ditinjau melalui komposisi pendapatan daerah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (www.bps.go.id), dimana dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 porsi pendapatan transfer secara konsisten jauh lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.1.

Berdasarkan grafik tersebut, jika dianalisis dari segi pertumbuhan, PAD menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan PAD dari tahun 2021 ke 2023 mencapai sekitar 21,56%, sementara kenaikan Pendapatan Transfer dalam periode yang sama relatif lebih rendah, yaitu sekitar 7,97%. Meskipun demikian, perbandingan nominal antara PAD dan pendapatan transfer masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar, dengan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 16% hingga 18%.

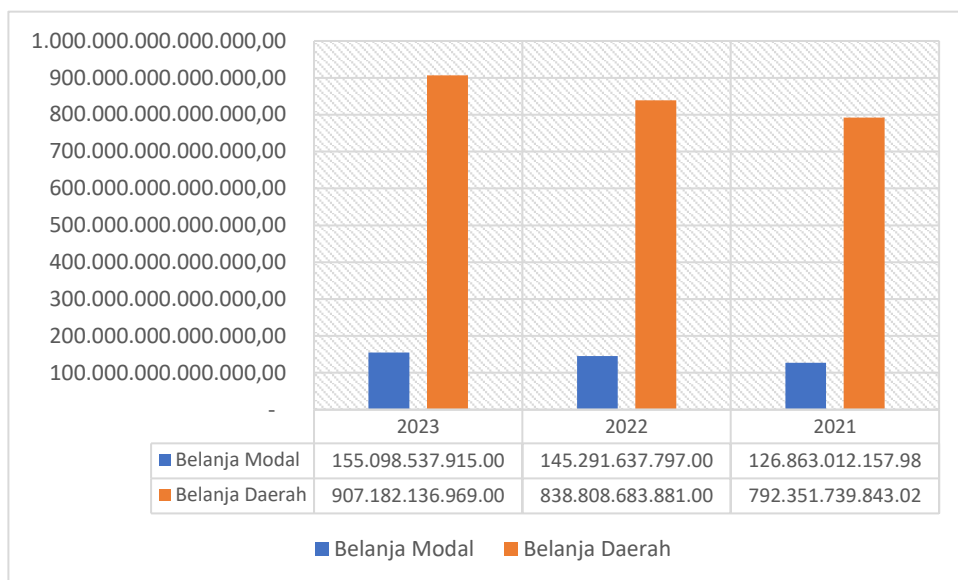


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Grafik 1.1 Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Rendahnya kontribusi PAD mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri masih terbatas. Daerah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah, yang menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengelola dan menghasilkan sumber daya keuangannya secara mandiri.

Tantangan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal merupakan komponen penting untuk mendukung akselerasi pembangunan karena mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan aset produktif jangka panjang. Rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia menunjukkan belanja modal di bawah 20% dari total belanja, sementara belanja operasional tetap mendominasi di atas 50% dari total belanja. Bila dibandingkan dengan total belanja daerah, proporsi belanja modal setiap tahunnya masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik 1.2 di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Grafik 1.2 Realisasi Belanja Modal dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Pada tahun 2021, porsi belanja modal hanya mencapai sekitar 16,01% dari total belanja daerah. Angka ini sedikit meningkat menjadi 17,32% pada tahun 2022, tetapi kembali menurun tipis menjadi 17,10% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja operasional dan kegiatan rutin lainnya dibandingkan investasi jangka panjang. Rasio belanja modal yang rendah dapat menjadi indikator bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah daerah cenderung belum sepenuhnya berorientasi pada pembangunan yang produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah, rendahnya alokasi belanja modal dapat berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, dua instrumen penting yang mencerminkan kinerja keuangan daerah adalah PAD dan belanja modal. Dengan meningkatnya PAD dan belanja modal dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan di daerahnya sendiri untuk mendanai pengeluarannya tanpa tergantung pada pemerintah pusat dan belanja modal mencerminkan investasi daerah dalam meningkatkan

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan.

Salah satu pernyataan Digdowiseiso *et al.* (2022) menyatakan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh dari menggali pembangunan melalui potensi daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar dalam membiayai kegiatan pembangunan. Tetapi kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Ketergantungan fiskal seperti ini dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Penelitian sebelumnya oleh Noeng *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin besar peningkatan PAD maka semakin besar pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian oleh Ratnasari & Meirini (2023) menunjukkan hasil yang berbeda yang menyatakan kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh PAD. Hal ini disebabkan karena tingkat penerimaan PAD masih tergolong rendah daripada total pendapatan daerah.

Selain PAD, komposisi belanja daerah khususnya belanja modal, juga memainkan peran penting dalam menentukan kinerja keuangan. Belanja modal yang proporsional dan tepat sasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat fondasi fiskal daerah. Sebaliknya, alokasi belanja yang tidak efisien atau terlalu besar pada belanja operasional dapat menghambat pencapaian kinerja keuangan yang optimal. Sementara itu Simamora & Budiwitjaksono (2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardelia *et al.* (2022) menemukan bahwa belanja modal tidak memiliki hubungan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketidakseragaman hasil penelitian sebelumnya memberi kesempatan untuk mengkaji adanya faktor moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan

antara PAD dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat layak untuk dijadikan variabel moderasi. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses memberikan dukungan terhadap program pemerintah (Putra & Rasmini, 2019). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, masyarakat harus mendukung setiap program yang telah disusun oleh pemerintah terutama program terkait peningkatan infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah serta program dalam menyusun kebijakan pendapatan dengan perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi pendapatan daerah.

Sebagian besar studi terdahulu lebih menekankan pada pengaruh langsung PAD atau belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah, tanpa mempertimbangkan peran partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan tiga variabel ini secara simultan dan populasinya masih terbatas pada kabupaten dan kota di satu provinsi saja. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di era otonomi fiskal dengan mengkaji bagaimana pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah atau PAD menurunkan rasio efisiensi?

2. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah atau belanja modal menurunkan rasio efisiensi?
3. Apakah partisipasi masyarakat mampu memperkuat PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah atau mampu memperkuat PAD menurunkan rasio efisiensi?
4. Apakah partisipasi masyarakat mampu memperkuat belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah atau mampu memperkuat belanja modal menurunkan rasio efisiensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau PAD menurunkan rasio efisiensi.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau belanja modal menurunkan rasio efisiensi.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa peran partisipasi masyarakat dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau peran partisipasi masyarakat dalam memoderasi pengaruh PAD menurunkan rasio efisiensi.
4. Untuk memperoleh bukti empiris peran partisipasi masyarakat dalam memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau peran partisipasi masyarakat dalam memoderasi pengaruh belanja modal menurunkan rasio efisiensi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan PAD dan belanja modal tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, apabila tidak diiringi dengan adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, maupun dalam evaluasi kinerja keuangan.

Bagi BPK dan DPRD, hasil penelitian ini memberikan masukan penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, aspek partisipasi masyarakat tidak boleh diabaikan. Keterlibatan masyarakat yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran, sehingga opini audit maupun pengawasan legislatif akan lebih berkualitas.

Bagi masyarakat luas, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya sekedar hak, tetapi juga merupakan peran penting dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kontribusi Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan analisis pada penelitian akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa partisipasi masyarakat, untuk melihat bagaimana keterlibatan publik dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara PAD, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penggunaan variabel moderasi ini menambah variasi metodologi penelitian, peneliti sebelumnya Yunita & Rasmini (2020) dan Fadilah & Andriani (2025) pengukuran partisipasi masyarakat menggunakan pertumbuhan pendapatan sedangkan dalam penelitian ini diukur melalui indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan keuangan yang membahas hubungan antara dua pihak prinsipal (pemberi izin, seperti pemilik, investor, atau masyarakat) dan agen (penerima izin, seperti manajer, pemerintah, atau birokrat). Prinsipal merupakan pihak yang memberi perintah kepada agen, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima perintah dan bertanggungjawab untuk menjalankan perintah tersebut. Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Dalam pemerintahan, yang bertindak sebagai prinsipal adalah masyarakat sedangkan yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang diberi amanat untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi dalam praktiknya hubungan antara prinsipal dan agen tidak selalu berjalan baik. Teori agensi menyoroti adanya potensi konflik kepentingan. Masyarakat menginginkan agar pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien, sedangkan pemerintah terkadang memiliki kepentingan lain, contohnya kepentingan politik, birokrasi, atau bahkan kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Selain itu, teori agensi juga menekankan adanya asimetri informasi, agen (pemerintah) memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih detail mengenai kondisi keuangan daerah dibandingkan prinsipal (masyarakat). Masyarakat hanya dapat menilai kinerja pemerintah melalui laporan keuangan, audit opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta realisasi PAD. Kesenjangan informasi ini dapat

dimanfaatkan oleh agen untuk menyembunyikan kelemahan atau menonjolkan pencapaian yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi penting sebagai alat untuk menilai apakah agen telah melaksanakan pemerintahan yang ditugaskan oleh prinsipal dengan baik.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Davis *et al.* (1997), menyatakan bahwa teori *stewardship* mendefinisikan di mana manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan sebagai pengelola yang motivasinya selaras dengan tujuan prinsipal mereka. Jadi ketika ada perbedaan antara kepentingan pemilik dan *steward*, maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama daripada melawan. Dalam hal ini, pemerintah (*steward*) sebagai pengelola sumber daya, sedangkan masyarakat (prinsipal) sebagai pemilik sumber daya. Menurut Digdowiseiso *et al.*, (2022), *stewardship* menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang dipercaya rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat termasuk dalam pengelolaan keuangan, yang mampu bertindak secara ekonomis dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa. Berdasarkan Raharjo (2007), teori *stewardship* diasumsikan mempunyai hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

Dalam konteks pemerintahan, teori ini berasumsi bahwa pemerintah (*steward*) berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pemerintah (*steward*) akan berusaha melindungi dan memaksimalkan sumberdaya yang ada dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat

sehingga masyarakat (prinsipal) akan mendapatkan kepuasan atau manfaat secara maksimal juga.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kinerja keuangan berasal dari informasi keuangan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Informasi keuangan yang dimaksud paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar & S (2020) kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Sementara itu, Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memantau, mengukur, mengevaluasi, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien (Insani *et al.*, 2023). Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya

memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan terhadap pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2015), rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Kemandirian daerah digambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana atau data eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan begitu sebaliknya. Menurut Siregar & S (2020), rasio kemandirian juga menggambarkan dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2. Rasio Pertumbuhan PAD

Menurut Mahmudi (2025), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Jika pertumbuhan positif menunjukkan terjadi peningkatan kinerja dari periode sebelumnya, dan jika penurunan negatif berarti telah terjadi penurunan kinerja dan harus dicari tau penyebabnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi – potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2014).

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2015). Efektivitas merupakan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan atau ditargetkan, dimana ukuran kemampuan tersebut tergantung dari tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan atau dicapai sesuai dengan kemampuannya. Sehingga efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut Jones & Pendlebury (2010) efektifitas berfokus terhadap output. Menurut Mahmudi (2015), efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya untuk dicapai. Dalam sektor publik, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dalam kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifnya suatu program atau kegiatan dilihat dari semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan. Pemerintah daerah dikatakan telah mampu menjalankan tugasnya bila mana rasio yang hendak dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas maka menggambarkan tingkat kemampuan daerah yang semakin baik.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Siregar & S (2020), Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat dan tepat mengenai berapa besar tingkat biaya yang telah dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh tingkat pendapatan yang telah diterimanya sehingga dapat diketahui bahwa apakah pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut berjalan efisien atau tidak. Hal ini sangat perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah sudah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti dan makna tersendiri karena apabila ternyata suatu tingkat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target dalam penerimaan pendapatannya tersebut lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan yang telah diterimanya (Halim, 2014). Menurut Mahmudi (2015), kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Jadi semakin kecil tingkat rasio efisiensi keuangan daerah berarti tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang didapatkan secara mandiri yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerah otonominya. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu dalam meminimalisir ketergantungannya terhadap pemerintah pusat (Sari & Halmawati, 2021). PAD yang tinggi biasanya dikaitkan dengan peningkatan kinerja keuangan karena pemerintah daerah mampu membiayai program pembangunan dari sumber pendapatan sendiri. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Fadilah & Andriani, 2025).

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan asli daerah meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ini termasuk untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (PP Nomor 12 Tahun 2019) dan merupakan bagian dari belanja daerah yang memainkan peran penting dalam menentukan kinerja keuangan dan menjadi salah satu sarana untuk mendukung pelayanan publik. Dengan belanja modal yang sesuai, Pemerintah akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan negara, yang tercermin dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya belanja modal tercermin dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pelaksanaan belanja modal oleh pemerintah daerah telah memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, menunjukkan bahwa dengan peningkatan belanja modal dan pengalokasian yang optimal, kinerja keuangan pemerintah dapat meningkat (Ningsih *et al.*, 2021). Jadi apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, maka nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang meliputi:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

2.1.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk kontribusi pemikiran, tenaga, maupun finansial. Menurut KBBI, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan dan partisipasi dalam suatu kegiatan atau peran.

Partisipasi masyarakat menurut Tawai & Yusuf (2017:9) dapat diartikan sebagai proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik secara langsung ataupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu.

Selain itu, Wilcox (1994) mengatakan bahwa dalam masyarakat terdapat lima tingkatan atau tahapan partisipasi yaitu:

1. Informasi

Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan data atau informasi yang diperlukan kepada pemerintah, contohnya berkaitan dengan kepemilikan objek pajak yang bisa dilakukan secara lisan atau melalui saluran informasi.

2. Konsultasi

Konsultasi mencakup hubungan antara masyarakat dan pemerintah setempat. Masyarakat berpartisipasi dengan mengunjungi kantor pemerintah secara langsung untuk mendapatkan informasi terkait manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk prosedur, tarif, dan cara pembayaran pajak tersebut.

3. Keputusan bersama

Masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan insentif atau denda PBB-P2.

4. Bertindak bersama

Masyarakat tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga menunjukkan sejauh mana kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai aktivitas seperti melibatkan warga dalam kegiatan sosialisasi, memberikan pelatihan mengenai prosedur pembayaran pajak, serta menyelenggarakan pertemuan rutin untuk menampung keluhan dan masukan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan proaktif membagikan informasi kepada lingkungan sekitar mereka.

5. Memberikan dukungan

Masyarakat diharapkan mengambil bagian secara aktif dalam mendukung program pemerintah. Bentuk dukungan itu dapat berupa membayar pajak daerah, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pajak daerah, atau

bahkan menjadi sukarelawan yang membantu administrasi pemungutan pajak daerah.

Dalam hal pembayaran pajak daerah keikutsertaan masyarakat sangat penting karena keberhasilan pengumpulan pajak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat sebagai pihak yang diwajibkan untuk membayar pajak daerah. Tingkat realisasi pajak daerah dapat dijadikan indikator seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan fiskal pemerintah daerah dan tingginya realisasi pajak daerah juga bisa digunakan sebagai adanya legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penggunaan pajak yang sudah mereka bayarkan.

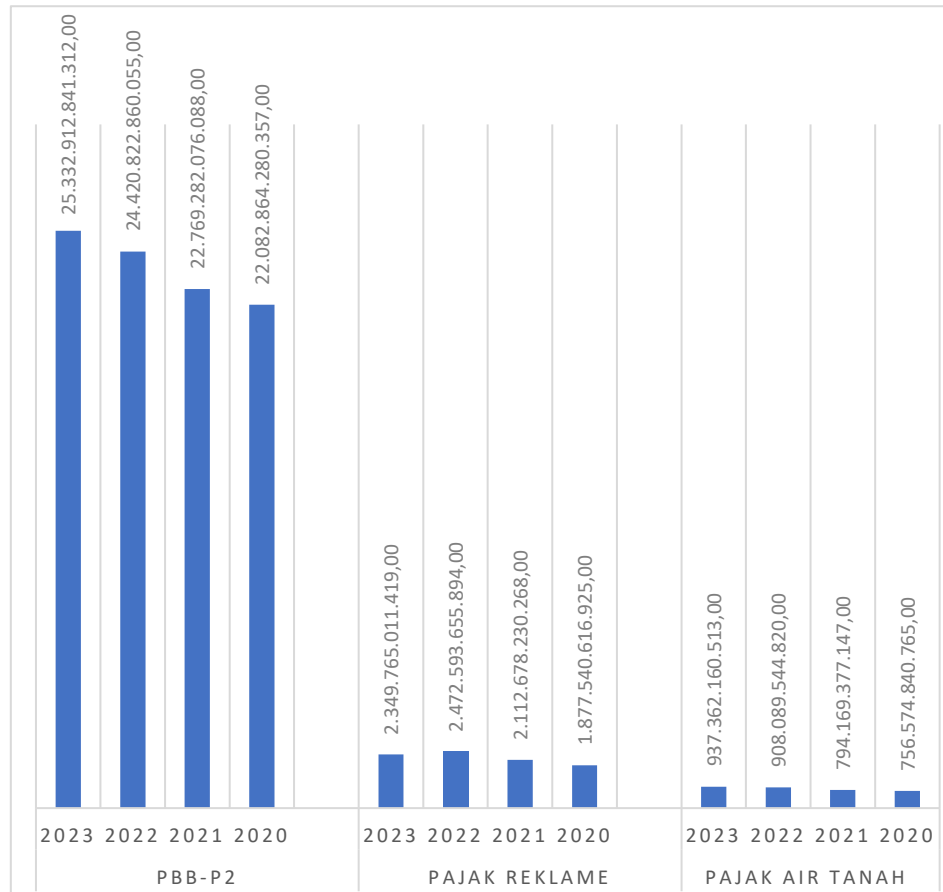
Ada dua cara yang digunakan pada sistem pemungutan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dipungut berdasarkan perhitungan sendiri. Pada penetapan Kepala Daerah, besarnya pajak terutang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi jelas, seragam dan memiliki kepastian hukum. Sedangkan pemungutan pajak yang menggunakan sistem berdasarkan perhitungan sendiri, dimana wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri akan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena kejujuran dan kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi ketepatan jumlah penerimaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat sulit diukur secara objektif.

Menurut PP Nomor 35 Tahun 2023, jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. pajak reklame;
- c. pajak air tanah;
- d. opsen PKB; dan
- e. opsen BBNKB.

Dari kelima objek pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, PBB-P2 merupakan jenis pajak yang menjadi sumber pajak daerah terbesar pada

kabupaten/kota untuk tahun 2020 s.d. 2023 (DJPK Kementerian Keuangan, 2024). Hal tersebut dapat dilihat dari grafik 2.1.



Grafik 2.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten / Kota Se-Indonesia Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Tahun 2022 s.d. 2023

Menurut Nurhayati *et al.* (2025), partisipasi masyarakat menjadi penting dalam konteks pembayaran pajak, termasuk PBB-P2, karena keberhasilan pemungutan pajak ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, PBB-P2 termasuk kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dibayarkan setiap tahunnya (berkesinambungan) dan memiliki basis data penerimaan yang luas dan merata karena hampir semua lapisan masyarakat yang memiliki tanah/bangunan terkena kewajiban membayar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amin Insani, Sri Rahayu, Misni Erwati	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Opini Audit Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan memberikan pengaruh yang negatif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2	Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, Salma Putri Mellinia	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Opini Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3	Dwi Ratnasari, Dianita Meirini	Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Silpa Dalam Pengaruhnya	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Silpa	Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan Silpa, serta

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kinerja Keuangan	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh belanja modal.
4	Addini Fitri Fadilah, Sri Andriani	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Partisipasi Masyarakat Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan. Partisipasi masyarakat secara efektif mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan.
5	Amanda Yecci Noeng, Lilis Ardini, Kurnia	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, Belanja modal tidak memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				keuangan daerah, Belanja modal tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah
6	Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat), 2020	Variabel Independen : rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan cukup dikarenakan karena rata rata rasio nya masih berada di interval 30,01% - 40,00%. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan sedang karena berada pada interval 50% - 75%. Rasio efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif karena rata rata efektivitas nya sudah melebihi 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai cukup efisien karena masih berada pada interval 80%-90%.
7	Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, Dumadi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks	Variabel Independen : PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, belanja modal tidak memiliki hubungan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga, dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Keempat, pendapatan asli

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)		daerah, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki hubungan secara simultan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
8	Sri Winarsih Ramadana, Mariana, Rahmaniar, Saiful Bahgia	Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : Belanja Modal, Direksi Akrua Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan Direksi akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah
9	Syahri Azda Putra	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	Variabel Independen : Total Aset, Rasio Pajak, Rasio Retribusi, Independent financing, Silpa, Opini BPK, Belanja Pemerintah Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara adalah expense atau belanja pemerintah, independent financing, opini BPK, rasio pajak, dan SILPA.
10	Winanda Chyntia Simamora, Gideon Setyo Budiwitjaksono	Analisis Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota	Variabel Independen : PAD, DAU, Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variabel

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020		independen dengan bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.
11	Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019
12	Putu Venny Yunita	Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Moderasi : Partisipasi Masyarakat	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
13	Yoga Wisnu Prayuda, Johan Arifin	Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah, leverage, pendapatan asli daerah, dan indeks pembangunan manusia	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Jumlah penduduk daerah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Leverage berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, IPM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah otonomnya.

PAD juga memiliki peran yang strategis karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya sendiri tanpa ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Dalam perspektif teori *stewardship* yang dimana masyarakat (prinsipal) memberikan mandat kepada pemerintah daerah (*steward*) untuk mengelola sumber daya publik secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menggali potensi PAD yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menunjukkan peran *stewardship*-nya dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab. Peningkatan PAD diharapkan tidak mendorong perilaku pemborosan belanja, melainkan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi kontribusi PAD yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi efisiensi.

Menurut Insani *et al.* (2023), PAD memberikan bukti empiris pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya pemerintah daerah diwajibkan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dengan tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga mencapai kinerja yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaresta *et al.* (2021), bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu membuktikan bahwa semakin besar atau kecilnya PAD maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula. Penelitian ini sejalan dengan Insani *et al.* (2023), Andaresta *et al.* (2021), Fadilah & Andriani (2025), Noeng *et al.* (2023), Ardelia *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori di atas maka hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1 : PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau PAD menurunkan rasio efisiensi.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan bagian utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki tujuan jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud yaitu membangun infrastruktur yang dapat digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Hal ini berarti belanja modal tidak hanya berdampak pada tahun berjalan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membangun atau meningkatkan aset tetap, seperti infrastruktur, gedung publik, dan fasilitas pelayanan masyarakat, sehingga belanja modal yang besar dikatakan dapat menjamin pelayanan publik secara lebih baik yang akan mengarah pada optimalnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari perspektif teori *stewardship*, penggunaan belanja modal yang direncanakan dan dilaksanakan secara tepat akan menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, karena dana yang dialokasikan pada belanja modal akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan setiap pengeluaran modal yang dikelola secara bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien, pembangunan aset produktif, dan peningkatan pelayanan publik.

Meskipun belanja modal meningkatkan sisi belanja, dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak serta-merta bersifat negatif. Belanja modal yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi dan penyediaan fasilitas publik, berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dan memperluas basis penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan kenaikan belanja akan menyebabkan rasio belanja terhadap pendapatan menjadi lebih kecil, yang mencerminkan peningkatan

efisiensi dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila belanja modal tidak direncanakan dan dikendalikan dengan baik, peningkatan belanja ini justru dapat meningkatkan beban pengeluaran daerah tanpa diikuti peningkatan pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, hubungan belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan produktivitas belanja modal tersebut.

Menurut Fatimah Az Zahrah *et al.* (2023), melakukan penelitian tentang belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan belanja modal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja modal digunakan secara efektif untuk menciptakan aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Penelitian juga dilakukan oleh Suandani & Astawa (2021), menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Digdowiseiso *et al.* (2022) menyimpulkan kesimpulan yang sama bahwa belanja modal oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan faktor penting yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan Fatimah Az Zahrah *et al.* (2023) Suandani & Astawa (2021), Digdowiseiso *et al.* (2022), Ningsih *et al.* (2021), dan Noeng *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tinjauan teori di atas maka hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau belanja modal menurunkan rasio efisiensi.

2.3.3 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi ini tidak hanya diwujudkan sebatas keterlibatan dalam perencanaan atau pengawasan, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk memberikan dukungan secara aktif terhadap program pemerintah. Untuk mendukung program pemerintah bisa diwujudkan dengan melakukan pembayaran pajak daerah.

Dalam hubungannya dengan teori Stewardship, partisipasi masyarakat menunjukkan adanya sinergi dan hubungan saling percaya antara principal (masyarakat) dan steward (pemerintah daerah). Ketika masyarakat berpartisipasi aktif, pemerintah terdorong untuk mengelola PAD secara transparan dan akuntabel, karena ada kesadaran moral bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target birokratis. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena hubungan yang berbasis kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab bersama akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan PAD untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah, maka kepercayaan dan dukungan terhadap pengelolaan PAD juga menurun, sehingga potensi PAD tidak dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025), partisipasi masyarakat mampu memoderasi hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. Partisipasi yang aktif menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih optimal memanfaatkan PAD untuk pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian juga

dilakukan oleh Yunita & Rasmini (2020), partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh PAD pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa adanya partisipasi masyarakat mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana partisipasi masyarakat mendorong pemerintah daerah dalam menambah pendapatan daerah yang secara langsung meningkatkan PAD sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh PAD menurunkan rasio efisiensi.

2.3.4 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan. Belanja modal bagian penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori *stewardship*, pemerintah daerah (*steward*) yang bertugas mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat (*principal*) termasuk belanja modal. Teori ini berasumsi bahwa pemerintah daerah memiliki motivasi yang selaras dengan tujuan masyarakat, yaitu menciptakan kesejahteraan publik dan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan. Belanja modal merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pendukung perekonomian daerah. Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional pemerintah daerah dalam mengelola dana publik demi manfaat jangka panjang masyarakat. Namun, tingkat keberhasilan belanja modal dalam

meningkatkan kinerja keuangan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai *steward*, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi yang tinggi, tercipta kepercayaan, transparansi, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya daerah secara optimal.

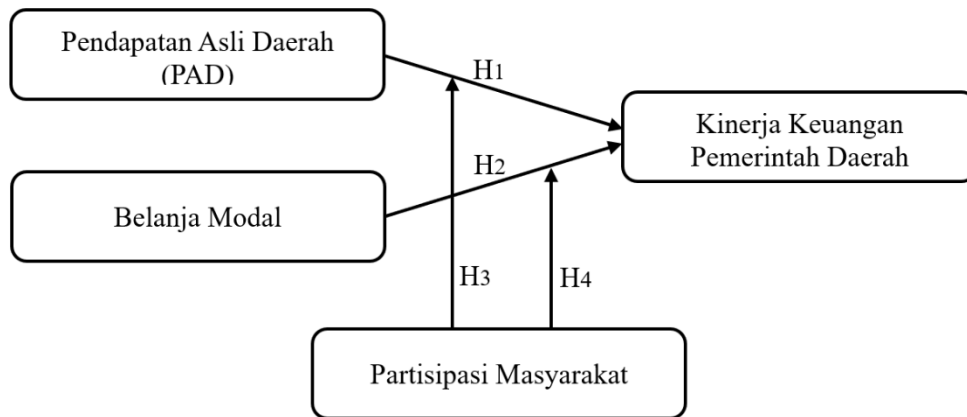
Menurut Fadilah & Andriani (2025), partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan, mekanisme partisipasi yang lebih terarah, transparan, dan disertai edukasi kepada masyarakat dapat menjadi solusi untuk memastikan dampak positif yang diharapkan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan. Menurut Yunita & Rasmini (2020), partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa adanya partisipasi masyarakat mampu memperkuat hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana partisipasi masyarakat mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja modal menurunkan rasio efisiensi.

2.4 Kerangka Penelitian

Dari uraian di atas, maka dapat dibuatkan kerangka pikir tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar II.2 Kerangka Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang akan digunakan berupa berupa angka yang akan mewakili variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari e-PPID BPK yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 dan 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Cooper & Schindler (2014) populasi adalah keseluruhan elemen atau objek yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian dan akan diambil kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah kumpulan dari semua unit yang ingin diteliti oleh peneliti. Sedangkan sampel menurut Sekaran (2003) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK-RI dengan rentang waktu dua tahun yaitu tahun 2022 s.d 2023 yang berjumlah 508 untuk tahun 2022 dan 508 untuk tahun 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Menurut Sugiyono (2011) metode sensus adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Cooper & Schindler (2014) variabel adalah segala sesuatu yang dapat berubah atau memiliki lebih dari satu nilai. Dalam konteks penelitian, variabel mewakili konsep yang ingin diukur, diamati, atau dianalisis, dan merupakan elemen penting dalam merumuskan hipotesis serta dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya yaitu PAD dan belanja modal. Selain itu terdapat partisipasi masyarakat yang memoderasi variabel independen dengan variabel dependen penelitian.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Keuangan daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sejalan dengan penelitian oleh Prayuda & Arifin,(2024), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Penggunaan rasio efisiensi pada penelitian menunjukkan seberapa besar belanja yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Artinya, rasio ini langsung mengukur apakah pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya keuangan secara hemat dan tepat guna. Berbeda dengan rasio lain seperti rasio efektivitas atau rasio kemandirian yang lebih menekankan pada kemampuan menghasilkan pendapatan, rasio efisiensi justru melihat bagaimana pendapatan tersebut digunakan.

Menurut Mahmudi (2015 : 85) efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*, pemerintah dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu

menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{KKPD} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Beban Operasional = merupakan jumlah beban operasional yang terdapat pada Laporan Operasional (LO) pemerintah daerah

Pendapatan Operasional = merupakan jumlah pendapatan operasional yang terdapat pada LO pemerintah daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Jadi semakin kecil tingkat rasio efisiensi keuangan daerah berarti tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dinyatakan efisien jika memenuhi kriteria seperti yang ungkapkan oleh Mahmudi (2015 : 111) pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria
< 90 %	Sangat Efisien
90 s.d. 99 %	Efisien
100%	Cukup Efisien
> 100 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2015)

Penggunaan data pendapatan operasional dan beban operasional dalam penelitian ini didasarkan pada Laporan Operasional (LO) yang disusun menggunakan dasar akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencatatan berbasis akrual dinilai lebih relevan karena mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah pada periode terjadinya transaksi, sehingga mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, tidak terbatas pada kas yang diterima atau dikeluarkan seperti di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Efisiensi bukan hanya sekedar hemat anggaran, tetapi bagaimana sumber daya ekonomi digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi.

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah tanpa ketergantungan kepada pemerintah pusat melalui pendapatan transfer. PAD yang tinggi, artinya dapat memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. PAD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$$

Realisasi PAD = merupakan realisasi total PAD yang terdapat pada LRA

Realisasi belanja daerah = merupakan realisasi total belanja yang terdapat pada LRA

Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar PAD yang digunakan pada belanja daerah pada tahun bersangkutan.

3.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, 2020). Belanja Modal (BM) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BM = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$$

Realisasi belanja modal = merupakan realisasi total belanja modal yang terdapat pada LRA

Realisasi belanja daerah = merupakan realisasi total belanja yang terdapat pada LRA

Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat mengetahui dari total belanja daerah seberapa besar yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun bersangkutan.

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu proses secara sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa tekanan dari pihak lain. Partisipasi Masyarakat (PM) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PM = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Anggaran PPB-P2}}$$

Realisasi PBB-P2 = merupakan realisasi PBB-P2 yang terdapat pada LRA

Anggaran PBB-P2 = merupakan anggaran PBB-P2 yang terdapat pada LRA

Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat mengetahui tingkat pencapaian target dan pemenuhan masyarakat, sehingga lebih menggambarkan sebagai indikator partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar nominal penerimaan saja.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi PAD, belanja modal dan partisipasi masyarakat, yang merepresentasikan kinerja keuangan. nilai rata-rata merupakan nilai untuk mengetahui rata-rata dari data yang kita teliti, standar deviasi digunakan untuk mengetahui variasi data yang akan diteliti, nilai maksimum

digunakan untuk menilai nilai terbesar dari data, sedangkan nilai minimum digunakan untuk menilai nilai terkecil dari data.

3.4.2 Regresi Data Panel

Menurut Gujarati & Porter (2009) data panel merupakan pendekatan yang mengkombinasikan data silang (*cross-section*) dan data deret waktu (*time series*). Dalam penelitian ini, terdapat 1028 entitas (kabupaten dan kota) yang diamati selama 2 tahun (2022–2023), sehingga membentuk struktur data panel. Terdapat tiga model yang digunakan untuk model regresi data panel yaitu metode *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) sebagai berikut:

a. *Common Effect Model* (CEM)

CEM adalah suatu model analisis data panel yang mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu (entitas). Pendekatan yang dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai teknik estimasinya. CEM berasumsi bahwa karakteristik setiap individu, baik itu perusahaan, individu, atau negara, adalah serupa.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

FEM adalah model yang menunjukkan walaupun intersep mungkin berbeda untuk setiap individu (entitas), tetapi intersep individu tersebut tidak bervariasi terhadap waktu (konstan). Teknik ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

c. *Random Effect Model* (REM)

REM metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan (*residual*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (entitas). REM mampu mengurangi penggunaan derajat kebebasan, sehingga estimasi menjadi lebih efisien. Dalam REM pendugaan parameter menggunakan metode *generalized least square*.

Menurut Gujarati & Porter (2009), pemilihan model atau teknik dalam regresi data panel yang tepat antara CEM, FEM dan REM dapat menggunakan tiga pengujian yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara CEM dan FEM dalam mengestimasi data panel. Dasar keputusan pemilihan model yaitu jika nilai probabilitas untuk *cross section* $F >$ nilai signifikan 0,05 maka model yang tepat untuk digunakan adalah CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas untuk *cross section* $F <$ nilai signifikan 0,05 maka model FEM akan menjadi pilihan yang tepat. Gujarati & Porter (2009) menjelaskan bahwa uji Chow digunakan untuk menguji apakah semua entitas memiliki intercept yang sama. Jika Uji Chow menunjukkan CEM maka sudah cukup karena membuktikan bahwa tidak ada perbedaan intercept antar entitas dan tidak perlu lanjut ke uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara FEM dan REM dalam mengestimasi data panel. Dasar keputusan pemilihan model yaitu jika nilai probabilitas untuk *cross-section random* $>$ nilai signifikan 0,05 maka model yang tepat untuk digunakan adalah REM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas untuk *cross section random* $<$ nilai signifikan 0,05 maka model FEM akan menjadi pilihan yang tepat. Jika hasil uji Hausman menunjukkan arah ke FEM, maka uji LM tidak diperlukan. Namun, jika uji Hausman menunjukkan bahwa REM adalah yang tepat, kita dapat melanjutkan dengan uji LM.

3. Uji Langrange-Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara CEM dan REM dalam mengestimasi data panel. Dasar keputusan pemilihan model yaitu jika nilai probabilitas *cross section Breusch-Pagan* $>$ nilai signifikan 0,05 maka model yang tepat untuk digunakan adalah CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *cross section Breusch-Pagan* $<$ nilai signifikan 0,05 maka model REM akan menjadi pilihan yang tepat.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan validitas model regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi bias.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengukur apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 maka data dianggap berdistribusi dengan normal.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarati & Porter (2009), uji multikolinearitas mengacu pada hubungan linear yang ada antara variabel independen satu sama lain. Multikolinieritas dilakukan jika regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari perkiraan yang diperoleh adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi gejala multikolinearitas. Jika nilai $VIF < 10$, maka dapat dikatakan model telah bebas dari multikolinearitas, sebaliknya jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinearitas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam

varians antara residu observasi dalam model regresi. Menurut Gujarati & Porter (2009) masalah heteroskedastisitas muncul jika varians dari variabel gangguan tidak konstan. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastis. Dalam penelitian ini, heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji *Glejser*. Persyaratan uji heteroskedastisitas apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, apabila variabel independen $< 0,05$ maka data terindikasi adanya heteroskedastisitas.

3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) tidak ada artinya.

3.4.4 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, pengujian model dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA adalah teknik analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dipengaruhi atau dimoderasi oleh variabel lain. Jika koefisien variabel interaksi signifikan, maka variabel moderator memoderasi hubungan antara independen dan dependen. Nilai positif atau negatif dari koefisien menunjukkan apakah moderasi dapat memperkuat, melemahkan, atau bahkan membalik arah hubungan antarvariabel. Model regresi moderasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{BM} + \beta_3 \text{PM} + \beta_4 \text{PM} * \text{PAD} + \beta_5 \text{PM} * \text{BM} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien regresi model

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

PM = Partisipasi Masyarakat
 ϵ = Tingkat Kesalahan (error)

Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen. Apabila nilai Sig. < 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap KKPD.

Menurut Sharma *et al.*, (1981), variabel moderasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe moderasi, yaitu moderasi murni (*pure moderator*), moderasi semu (*quasi moderator*), moderasi prediktor (*predictor moderator*), dan moderasi potensial (*homologizer moderator*) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika variabel moderasi tidak signifikan, dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen signifikan, maka variabel moderasi berfungsi sebagai *pure moderator*.
- b. Jika variabel moderasi signifikan dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen signifikan, maka variabel moderasi berfungsi sebagai *quasi moderator*.
- c. Jika variabel moderasi signifikan dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen tidak signifikan, maka variabel moderasi berfungsi sebagai *predictor moderator*.
- d. Jika variabel moderasi tidak signifikan dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen juga tidak signifikan, maka variabel moderasi berfungsi sebagai *homologizer moderator*.

3.4.5 Pengujian Hipotesis

3.4.5.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Gujarati & Porter (2009), menyatakan bahwa uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 dinilai dari rentang 1 sampai dengan 0, dimana nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki

kemampuan besar dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.4.5.2 Uji Statistik F

Uji F adalah metode statistik dalam analisis regresi yang digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini menilai kebermaknaan model regresi secara keseluruhan (Gujarati & Porter, 2009). Uji F bertujuan untuk menguji model penelitian, apakah model yang telah dibangun dapat memberikan penjelasan yang baik pada variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka model penelitian dinyatakan layak, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model penelitian dinyatakan tidak layak.

3.4.5.3 Uji Statistik t

Uji statistik t adalah prosedur untuk mengevaluasi hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara individual (Gujarati & Porter, 2009). Kriteria pengujian pada taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut:

- Apabila $p\text{-value} > 0,05$, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila $p\text{-value} < 0,05$, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi, yang dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin besar PAD membuat KKPD menjadi tidak efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan belanja daerah yang efisien. Oleh karena itu, meskipun PAD berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, peningkatannya perlu disertai dengan perencanaan dan pengendalian belanja yang lebih efektif agar benar-benar mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Semakin besar BM membuat KKPD menjadi tidak efisien. Penurunan efisiensi tersebut tidak serta-merta mencerminkan ketidakefektifan belanja modal, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik belanja modal yang memiliki *time lag effect*, di mana manfaat ekonomi dan fiskal dari pembangunan aset dan infrastruktur jangka panjang tidak dapat dirasakan secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum secara langsung diikuti oleh perbaikan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dalam jangka pendek peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, peningkatan belanja modal perlu diiringi dengan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang menekankan keterkaitan antara belanja,

output, dan outcome ekonomi agar dapat mendorong perbaikan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Partisipasi masyarakat terbukti memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah dalam meningkatkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari sinergi antara kapasitas fiskal daerah dan peran partisipasi masyarakat. Ketika peningkatan PAD dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang memadai, pengelolaan keuangan daerah cenderung menjadi lebih efisien sehingga rasio pengeluaran terhadap penerimaan dapat ditekan. Hasil pengujian moderasi juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan sebagai quasi moderator dalam hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah dan mampu secara signifikan memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terbukti memperlemah pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, tingginya partisipasi masyarakat juga perlu diimbangi dengan tata kelola keuangan yang baik agar belanja modal yang dihasilkan benar-benar mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, di penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan sebagai prediktor moderator yaitu berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tetapi tidak mampu secara signifikan memperkuat atau memperlemah pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dapat berdiri sendiri sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi sejauh mana belanja dapat

dimanfaatkan secara efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Berikut keterbatasan yang dimiliki pada penelitian ini, yaitu:

1. Pada pengukuran PM tidak memasukkan rekening Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) karena kabupaten dan kota baru mulai mengimplementasikan pada tahun 2025.
2. Pengukuran efisiensi sebagai satu-satunya indikator pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini berpotensi menimbulkan bias interpretasi, hal ini disebabkan oleh sifat rasio efisiensi dimana nilai yang semakin kecil menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

5.3 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang yaitu:

1. Selain menggunakan rekening Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pengukuran variabel partisipasi masyarakat dengan menambahkan rekening Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Penambahan indikator ini penting karena Opsen PKB dan Opsen BBNKB mencerminkan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah yang bersifat lebih luas dan berkelanjutan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur rasio efisiensi dengan pendekatan analisis output per input, agar hasil regresi dapat diinterpretasikan dengan baik mengikuti aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227/882>
- Andy Field. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/doi.org/10.2307/259223>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580.
- DJPk Kementerian Keuangan. (2024). *Media Komunikasi dan Informasi Desentralisasi Fiskal* (37th ed.).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198.
- Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, & Salma Putri Mellinia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Salemba Empat : Jakarta.
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). *Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 6(1), 109–125.
- Jensen, M. C., & Meckling, H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public Sector Accounting* (6th ed.). Prentice Hall.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (pp. 1–259). Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>
- Ningsih, S., Syva, M. P., & Rukmini. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6(1999), 1–13.
- Noeng, A. Y., Ardini, L., & Kurnia, K. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2905–2916. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1689>
- Nurhayati, Handayani, R., & Febriadi, H. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur*. 2(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). *Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 6, 77–87.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. 28, 132–158.

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–36.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2023). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business A Skill Building Approach* (4th ed.). John Wiley & Sons, New York.
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 291–300.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Siregar, A. O., & S, I. M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1–19.
- Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. In *Literacy Institute*. Literacy Institute.
- Thomas, G. B., & Finney, R. L. (1998). *Calculus* (9th ed.). Addison-Wesley Publishing Company.
- Undang-Undang RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wilcox, D. (1994). *The Guide to Effective Participation*. Delta Press, Brighton.
- Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan. *E - Jurnal Akuntansi*, 30(4).